

***KOMUNIKASI KRISIS PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM  
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19***

Elisabeth Sianturi, Adi Nugroho, Agus Naryoso  
[elisabethvilensysianturi@gmail.com](mailto:elisabethvilensysianturi@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407**

**Faksimile (024) 746504 Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

***ABSTRACT***

Covid-19, which is caused by a new type of corona virus, was first spread through Wuhan, China at the end of 2019 and spread widely to more than 114 countries. On March 11, 2020, the corona virus was categorized as a global pandemic. Then in April 2020, several countries on the continent of Europe, Asia and America implemented lockdowns where millions of people confirmed to have been exposed to the corona virus had to quarantine (WHO, 2020). The impact of the Covid-19 pandemic so far poses a health risk to the community, has an impact on the economy and also the social environment.

This study uses the constructivism paradigm. This research explains that the constructivism paradigm considers social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of social actors producing and managing everything related to their social life.

The results of this study are that the Transformation of Government Public Communication from Crisis Communication to Risk Communication must be carried out not only because of a request from the World Health Organization as an evaluation of government-run communications, but also as a form of improving the Indonesian government's communication strategy in handling COVID-19. -19.

The success of risk communication cannot only be seen from the government's public communication strategy through various media. However, what is also important is how the public responds to various information submitted by the government. The public is also expected to play an active role in producing and disseminating information and education needed by all parties who need information from reliable and responsible sources with good and interesting content about various efforts to deal with the COVID-19 pandemic.

**Keywords: Covid-19, Indonesia, Crisis Communication, Semarang**

***ABSTRAK***

Covid-19 yang disebabkan oleh tipe baru berupa virus corona, pertama kali disebarkan melalui Wuhan, China pada akhir 2019 menyebar secara luas terhadap lebih dari 114 negara. Pada 11 Maret 2020, virus corona dikategorikan sebagai pandemi global. Kemudian pada April 2020, beberapa negara di Benua Eropa, Asia, dan Amerika melakukan *lockdown* dimana jutaan orang terkonfirmasi terpapar virus corona harus melakukan karantina (WHO, 2020). Dampak

pandemi Covid-19 sejauh ini menimbulkan risiko kesehatan kepada masyarakat, berdampak pada ekonomi dan juga lingkungan sosial.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menjelaskan bahwa paradigma konstruktivisme menganggap ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* lewat pengamatan langsung dan detil terhadap pelaku sosial memproduksi dan mengelola segala hal yang terkait dengan sosial mereka.

Hasil dari penelitian ini bahwa Transformasi Komunikasi Publik Pemerintah dari Komunikasi Krisis menjadi Komunikasi Risiko harus dilakukan bukan hanya karena permintaan dari Lembaga Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai evaluasi terhadap komunikasi yang dijalankan pemerintah, namun juga sebagai bentuk perbaikan strategi komunikasi pemerintah Indonesia dalam penanganan covid-19.

Keberhasilan komunikasi Risiko tidak hanya bisa dilihat dari strategi komunikasi publik yang dijalankan pemerintah melalui berbagai media. Namun yang penting juga adalah bagaimana kemudian publik merespon berbagai informasi yang disampaikan pemerintah. Publik juga diharapkan berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang membutuhkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab dengan kemas konten yang bagus dan menarik tentang berbagai upaya penanganan pandemi covid-19.

### **Kata Kunci : Covid-19, Indonesia, Komunikasi Krisis, Pemerintah**

#### **PENDAHULUAN**

Covid-19 yang disebabkan oleh tipe baru berupa virus corona, pertama kali disebarkan melalui Wuhan, China pada akhir 2019 menyebar secara luas terhadap lebih dari 114 negara. Pada 11 Maret 2020, virus corona dikategorikan sebagai pandemi global. Kemudian pada April 2020, beberapa negara di Benua Eropa, Asia, dan Amerika melakukan *lockdown* dimana jutaan orang terkonfirmasi terpapar virus corona harus melakukan karantina (WHO, 2020). Dampak pandemi Covid-19 sejauh ini menimbulkan risiko kesehatan kepada masyarakat, berdampak pada ekonomi dan juga lingkungan sosial (Macnamara, 2021).

Perlu diketahui bahwa bencana tidak hanya mencakup dalam bentuk gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, atau kebakaran hutan, tetapi juga wabah penyakit. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh alam atau non alam faktor yang merenggut banyak

nyawa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan sumber bencana dikategorikan menjadi tiga. Pertama, bencana alam, bencana ini disebabkan oleh peristiwa alam tersebut seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung, dan longsor. Kedua, bencana non alam, bencana ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah. Ketiga, bencana sosial, bencana ini disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti konflik sosial antar kelompok atau antara komunitas dan teror. Berdasarkan tiga definisi tersebut, maka Covid-19 termasuk dalam kategori sumber bencana non alam seperti di bentuk wabah penyakit (*non-natural disaster crisis*) (Octastefani, 2020).

Penanganan bencana non alam tentu saja demikian berbeda dengan bencana alam atau bencana sosial yang terjadi secara langsung. Jika bencana alam atau sosial bencana terjadi, proses penanganan dapat dilakukan di lokasi terjadinya bencana dan dapat langsung berinteraksi dengan para korban. Namun, berbeda dari wabah yang penanganannya harus dilakukan dengan sangat baik hati-hati sengaja untuk

mencegah pembantu dari menjaditerinfeksi virus yang bersumber dari manusia diselamatkan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa wabah penyakit merupakan produk dari kerawanan suatu bencana. Untuk itu perlu adanya upaya yang cermat dan tepat penanganan cepat; di sisi lain, pemahaman dan kompetensi mitigasi bencana masih sangat tinggi terbatas karena Covid-19 adalah jenis epidemi baru; akibatnya sangat berpotensi untuk tertular virus.

Kehadiran Covid-19 selain berdampak pada kesehatan manusia di dunia juga cukup luas di bidang ekonomi. World Economic Forum (WEF) menilai bahwa penyebaran virus corona (Covid-19) akan berdampak pada perekonomian dunia. Banyak negara memprediksi bahwa perekonomian mereka akan mengalami resesi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi beberapa negara negatif. Bahkan, negara berkembang menghadapi Covid-19 tiga kali lebih sulit dibandingkan negara maju. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan 170 negara akan mengalami pendapatan per kapita negatif pada tahun ini (Praditya, 2020). Dalam konteks Indonesia, pandemi ini juga berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Pandemi menyebabkan indeks pasar saham jatuh, rupee jatuh dan pelaku sektor riil menghadapi kesulitan bisnis. Lembaga keuangan global, ekonom, dan pejabat pemerintah telah membuat beberapa perkiraan ekonomi bahwa Indonesia dapat menghadapi skenario terburuk jika pandemi tidak ditangani dengan baik. Pada 24 Maret 2020, IHSG turun 1,3% menjadi 3.937 poin. Selama sepekan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh ke level terendah delapan tahun. IHSG tembus di bawah level 3000 di 3955,58 pada 24 Juni 2012. Selain menghancurkan pasar modal, Covid-19 juga menjatuhkan rupiah. Tercatat pada 23 Maret 2020, harga jual dolar AS menembus Rp 17 ribu di lima bank besar (Aria, 2020).

Selain memberikan dampak secara ekonomi, Covid-19 juga memberikan dampak berupa krisis politik. Di Kosovo,

Covid-19 bahkan mampu meruntuhkan Perdana Menteriya yakni Albin Kurti. Terdapat 82 dari 120 suara legislatif mendukung penuh mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri tersebut yang tidak ingin menetapkan status darurat terhadap pandemi Covid-19 (Kumparan, 2020). Maka Covid-19 benar-benar menjadi krisis yang cukup besar di berbagai sektor bagi berbagai dunia, tidak hanya Indonesia.

Pandemi Covid-19 turut menguji kesiapan berbagai negara, termasuk Indonesia dalam merespon dampak sebuah bencana yang tidak hanya terjadi pada sektor kesehatan. Akan tetap terdapat catatan mengenai munculnya sejumlah masalah permasalahan dalam pelaksanaan program atau kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan belum efektifnya langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Smeru, 2020).

Kesiapan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 mulai menjadi sorotan mulai pada akhir Januari 2020. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penduduk di Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa dan tersebar di banyak pulau memerlukan pekerjaan yang berat untuk mengantisipasi penyebaran virus secara lebih serius. Upaya yang dilakukan pada tahap awal Covid-19 diantaranya melakukan pengawasan ketat terhadap kurang lebih 135 pintu masuk jalur darat, laut, dan udara di Indonesia (Smeru, 2020). Pada sisi yang lainnya, desentralisasi telah membuat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan kesehatan ini.

Kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Semarang termasuk dalam kasus yang tinggi dan mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah provinsi bahkan nasional. Diketahui bahwa total kasus yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 19,663 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 1,652. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 69,536 total kasus dengan 4,848 kasus meninggal.

Sedangkan dalam catatan terakhir pada tahun 2022 diketahui terdapat 108,862 total kasus dengan 8,152 kasus meninggal di Kota Semarang (Siaga Corona, 2022).

Kota Semarang termasuk daerah yang memerlukan kesiapan personel dan alat pendukung pemeriksaan Covid-19 pada tahap awal kondisi darurat Covid-19. Kesiapan pemerintah Kota Semarang turut disoroti dalam hal ini berkaitan dengan ketidaksiapan RSUP dr. Kariadi Semarang sebagai tempat pengecekan Covid-19 atas dasar kekurangan alat dan SDM sehingga dialihkan ke Kota Salatiga sebagai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP)

Pada periode bulan April 2020, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa terdapat 3 daerah yang berpotensi menjadi episentrum baru yang salah satunya yakni Kota Semarang (Purbaya, 2020). Hal tersebut dikarenakan tingginya kasus Covid-19 di Kota Semarang sejumlah 240 kasus positif dan 30 orang meninggal dunia (Saputra, 2020).

Respon negatif yang diberikan masyarakat terhadap lambatnya penanganan dari pemerintah berkaitan dengan tracing yang sudah dilaporkan untuk dirujuk pada rumah karantina. Hal tersebut turut disanggah pihak puskesmas yang menyatakan bahwa jumlah orang terpapar di Kota Semarang tidak sebanding dengan petugas puskesmas di Kota Semarang sehingga dalam pelaksanaan *testing*, *tracing*, dan *treatment* tidak dapat dilakukan secara maksimal (Yunita, 2021). Pada tahun 2021, dilansir melalui Katadata Kota Semarang bahkan menerima predikat jumlah positif meninggal dunia Covid-19 tertinggi di Indonesia (hingga periode 5 Juli 2021) mencapai 4,262 kasus di atas Jakarta Timur sebanyak 2,542 kasus, dan Jakarta Selatan dengan 1,951 kasus (Darmawan, 2021).

Pada akhir tahun 2022, diketahui bahwa angka Covid-19 di Kota Semarang masih mengalami kenaikan yang mana jumlah tersebut melebihi prediksi yang

telah diperkirakan. Terdapat jumlah kasus Covid-19 tertinggi pada bulan November 2022 yang mencapai 183 kasus, yang awalnya rata-rata kasus per hari hanya 30 naik menjadi 50 kasus per harinya (Yusuf, 2022). Lebih parah lagi, disebutkan dalam media *online* bahwa persentase kenaikan tertinggi ada pada usia 1-19 tahun atau usia anak sekolah yang persentasenya naik sekitar 78% (Iman, 2022). Pernyataan-pernyataan berita di atas tentu menjadi salah satu bagian dari serangkaian upaya komunikasi krisis yang harus dikaji secara keseluruhan baik dari fase *pre-crisis*, *crisis*, dan *post crisis*.

Untuk memerangi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan beberapa strategi untuk menekan penyebaran penyakit Covid-19 (Hidayat, 2020). Beberapa strategi dilakukan, antara lain penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Maret 2020. PSBB kemudian diubah menjadi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Januari 2021 (Handayanto dan Herlawati, 2020). Baik PSBB maupun PPKM bertujuan untuk mencegah berkumpulnya masyarakat dan menerapkan social distancing (Hidayat et al, 2020; Susiati et al, 2021). Strategi lain yang diterapkan pemerintah adalah mensosialisasikan 3 juta cara (disebut juga protokol kesehatan), yaitu menjaga jarak (social distance), memakai masker dan mencuci tangan setiap saat (Hidayat, 2020; Hidayat et al, 2020). Rosidin et al., 2020). Namun, penerapan strategi-strategi tersebut di atas tidak selalu mudah diterapkan secara konsisten di masyarakat. Hal ini karena masyarakat belum sepenuhnya terbiasa menerapkan strategi-strategi tersebut. Apalagi masyarakat sendiri masih belum bisa lepas dari kebiasaan lama yang berlaku di era sebelum pandemi Covid-19. Kebiasaan tersebut antara lain menghadiri acara yang mengundang banyak orang dan memakai masker serta jarang mencuci tangan. Oleh karena itu, masyarakat terkadang menolak pelaksanaan kebijakan dan praktik kesehatan PPKM (Hidayat et al,

2020; Rosidin et al, 2020). Karena itu peran pemerintah desa sebagai level pemerintahan terendah menjadi penting. Hal ini dikarenakan pemerintah desa memiliki hubungan yang relatif dekat dengan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai krisis PR, pemerintah desa juga berperan penting dalam mendidik dan mendorong masyarakat desa untuk mengikuti kebijakan PPKM dan protokol kesehatan (Hidayat, 2020; Hidayat, dkk, 2020).

Oleh karena itu, komunikasi risiko berperan dalam menjembatani kesenjangan karena risiko dapat teridentifikasi dengan baik jika masalahnya dipahami dengan baik (Trikonen dan Luoma-aho, 2011). Memiliki strategi komunikasi darurat merupakan bagian penting dari manajemen darurat untuk melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat dan menyaring informasi yang diperlukan. Informasi yang sumber dan kebenarannya terkadang tidak jelas, menimbulkan kepanikan warga dalam situasi krisis. Hal ini karena peran komunikasi krisis adalah untuk memandu pemerintah dalam menyelesaikan situasi darurat..

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Komunikasi Krisis**

Menurut (Devlin, 2007) "krisis" adalah waktu yang tidak stabil untuk sebuah organisasi dengan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. Interpretasi berarti bahwa krisis adalah keadaan organisasi yang tidak stabil yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

### **2. Manajemen Isu**

Studi ini memberikan gambaran manajemen strategis dalam menghadapi masalah negatif. Perburuan (1984:34) Rachmat dalam buku Kriyantono (2015) mendefinisikan masalah sebagai masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusan. Masalah adalah masalah yang sulit dipecahkan yang membutuhkan keputusan cepat

untuk dipecahkan. Masalah adalah keadaan atau peristiwa internal dan eksternal suatu organisasi yang akan berdampak signifikan terhadap operasi, efisiensi, atau kepentingan organisasi di masa depan (Regester & Larkin, 2003).

### **3. Komunikasi Publik**

Komunikasi publik adalah penyampaian informasi atau pesan berupa ajakan, pemikiran, dan gagasan kepada khalayak umum (masyarakat umum), yang tidak dapat diidentifikasi oleh media secara individual. Menurut De Vito (1998), komunikasi publik adalah komunikasi yang ditujukan kepada siapa saja yang melihat dan membacanya, atau informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum melalui penyiaran audio dan video.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah interpretatif, dengan pendekatan tersebut, komunikasi krisis dapat dihadirkan untuk menjawab persepsi masyarakat terhadap buruknya kinerja Kota Semarang dalam menangani Covid-19. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif, di mana fakta empiris tentu saja diasumsikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **1. Identitas Informan**

Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada sebanyak 5 orang informan yang merupakan pegawai di Pemerintahan Kota Semarang. Wawancara secara mendalam dilakukan agar dapat mendeskripsikan bagaimana krisis komunikasi Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan Covid-19. Berikut adalah beberapa informan penelitian yang telah diwawancarai :

**Informan 1** adalah seorang laki laki

berusia 27 tahun bernama Aditya, saat ini dia bekerja sebagai salah satu pegawai di Pemerintahan Kota Semarang bagian Humas. Aditya mengaku dalam penanganan Covid-19 di Kota Semarang terkait komunikasi sangat sulit.

**Informan II** adalah seorang perempuan bernama Saski berumur 27 tahun saat ini dia salah satu pegawai di Pemerintahan Kota Semarang bagian Promkes. Saski mengakui cukup menantang dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kota Semarang terlebih saat Covid-19 sedang melonjak.

**Informan III** seorang laki laki berusia 26 tahun bernama Agus saat ini dia salah satu pegawai Pemerintahan Kota Semarang di Dinas Komunikasi dan Informasi. Agus mengakui untuk komunikasi dan media komunikasi terkait covid-19 di Kota Semarang sudah bagus.

**Informan IV** adalah seorang perempuan bernama dyas berusia 25 tahun. Dyas menjadi salah satu pegawai Pemerintahan Kota Semarang di Dinas Komunikasi dan Informasi. Dyas mengakui untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan penanganan covid-19 pada masyarakat memang sulit.

**Informan V** bernama Berri dan berusia 25 tahun, salah satu pegawai Pemerintahan Kota Semarang. Berri mengatakan media informasi dan alur informasi untuk komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sudah baik dilakukan dan sudah maksimal.

## 2. Deskripsi Tekstural

Pada sub tema ini deskripsi tekstural adalah bagian dari pendekatan fenomenologi yaitu *cluster of meaning* dimana tujuan dari deskripsi tekstural adalah untuk mengelompokkan pernyataan serta informasi yang didapat dari informan menjadi beberapa sub tema atau deskripsi makna, dalam hal ini tugas peneliti adalah mendeskripsikan mengenai pengalaman yang dialami oleh informan yang menjadi subjek dari judul penelitian yaitu “analisis komunikasi krisis Pemerintah Kota

Semarang dalam Penanganan Covid-19”. Penyusunan deskripsi tekstural berdasar pada hasil wawancara dengan informan yang sebelumnya telah melalui tahapan *horizontalisasi* dan *open coding*. Pada tahapan deskripsi tekstural ini harapannya peneliti mampu menemukan konsep konsep yang sesuai dengan tema penelitian.

### 3. Deskripsi Tekstural Informan 1

a. Pandangan pribadi terkait komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan Covid-19

Informan 1 adalah seorang laki laki berusia 27 tahun bernama Aditya, saat ini dia bekerja sebagai salah satu pegawai di Pemerintahan Kota Semarang bagian Humas. Aditya mengaku dalam penanganan Covid-19 di Kota Semarang terkait komunikasi sangat sulit. Seperti kebanyakan orang lainnya untuk persiapan komunikasi krisis Pemerintah Kota Semarang yaitu perencanaan dahulu, komunikasi melibatkan banyak pihak termasuk dengan kepolisian setempat serta stakeholder tiap kecamatan. Media yang digunakan untuk komunikasi krisis Pemerintah Kota Semarang adalah media sosial, instansi kesehatan di tiap kecamatan, lalu dari stakeholder setempat juga, bahkan radio.

b. Media, tujuan, dan pedoman yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Covid-19.

### 4. Connectedness and separatedness

Dalam melakukan komunikasi krisis Pemerintah Kota Semarang menggunakan banyak media untuk melancarkan publikasi dalam penanganan covid-19 dan bekerjasama dengan banyak stakeholder serta sektor-sektor pada setiap wilayah agar informasi lebih mudah dan cepat .

*“Dari media sosial, instansi kesehatan di tiap kecamatan, lalu dari stakeholder setempat juga, bahkan radio”*

*”Menyampaikan informasi secara berkala beserta hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat setempat dengan bahasa yang mudah dipahami, diantaranya: Informasi tentang*

*ketersediaan, distribusi dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya; Informasi cara mendapatkan hak atas program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya; Informasi akses layanan keuangan dan perbankan; dan Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak”*

### 5. **Certainty and uncertainty**

Informan 1 mengaku tujuan untuk menghadapi komunikasi krisis serta pedoman melakukan publikasi informasi di Pemerintah Kota Semarang berpaku pada menghentikan penyebaran virus Covid-19 dan memiliki pedoman yang terstruktur dari data-data yang dapat dipertanggungjawabkan

*“Iya, tujuan pemerintah ya pastinya untuk menekan penyebaran virus covid-19 dan mempercepat penanganan covid-19 agar kota semarang segera terhindar dari covid-19. Sebab sejak penyebaran Virus Covid-19 banyak informasi hoaks dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar sehingga membingungkan masyarakat”*

*“Memiliki prosedur pengumpulan data/informasi sebagai pedoman bersama instansi untuk dilakukan sinkronisasi sebelum disampaikan ke publik; menyampaikan status waktu bagi data/informasi yang disampaikan ke publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/informasi; memastikan agar data/informasi terkait dengan sebaran dan penanganan Covid-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah potensial terdampak .”*

### **Deskripsi Tekstural Informan 2**

#### **1. Pandangan pribadi terkait komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan Covid-19**

Informan kedua merupakan

seorang perempuan bernama Saski berumur 27 tahun saat ini dia salah satu pegawai di Pemerintahan Kota Semarang bagian Promkes. Saski mengakui cukup menantang dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kota Semarang terlebih saat Covid-19 sedang melonjak.

#### **2. Media, tujuan, dan pedoman yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Covid-19**

##### **a. Connectedness and separatedness**

Informan 2 menginfokan bahwa media yang digunakan untuk publikasi dan komunikasi krisis adalah media sosial, media massa.

*“Yaa media sosial, terus media radio, media massa”*

##### **b. Certainty and uncertainty**

Menurut informan 2 tujuan dilakukan komunikasi yang baik di krisis komunikasi saat Covid-19 adalah untuk menjaga imun tubuh masyarakat agar tetap stabil dan baik serta tidak menerima informasi yang salah atau membuat masyarakat panik. Untuk pedoman informasi yang pasti mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat mudah menerapkan protokol kesehatan.

*“Tetap kita infokan yang meninggal dan positif, terkait itu malah menjadi imun masyarakat turun ya tidak apa-apa, soalnya semakin takut itu masyarakat malah semakin waspada, kalau masyarakat semakin waspada justru lebih baik, malah semakin mudah untuk diatur. Namun kita juga sering memberikan informasi yang baik-baik, dan terkadang sering menyampaikan berita-berita yang menghibur kepada masyarakat melalui whatsapp contohnya .”*

*“Standar komunikasi yang pasti harus mudah diterima oleh masyarakat dengan publikasi yang menarik agar masyarakat mudah untuk menerapkan ”*

### **Deskripsi Tekstural Informan 3**

#### **1. Pandangan pribadi terkait komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan Covid-19**

Seorang laki laki berusia 26 tahun bernama Agus saat ini dia salah satu pegawai Pemerintahan Kota Semarang di Dinas Komunikasi dan Informasi. Agus mengakui untuk komunikasi dan media komunikasi terkait covid-19 di Kota Semarang sudah bagus. Peran media massa dalam percepatan penanganan Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 sangat penting. Namun masih dijumpai di daerah, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 belum optimal dalam menggandeng media massa dalam melakukan kolaborasi dan sinergi pentaheliks dalam percepatan penanganan Covid-19. Media massa yang berperan dalam penyampaian informasi dan edukasi masyarakat. Peran media massa tersebut diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Sejumlah organisasi profesi wartawan maupun perusahaan pers, sudah sering mendorong kolaborasi dan sinergi tersebut.

#### **2. Media, tujuan, dan pedoman yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Covid-19.**

##### **a. Connectedness and separatedness**

Informan 3 memberikan informasi terkait Media, seperti yang saya ungkapkan tadi biasanya kami lebih menggunakan media cetak seperti baleho, sapnduk, banner dan juga media sosial seperti facebook dan

instagram.

*“Media, seperti yang saya ungkapkan tadi biasanya kami lebih menggunakan media cetak seperti baleho, sapnduk, banner dan juga media sosial seperti facebook dan instagram”*

##### **b. Certainty and uncertainty**

Informan 3 menyatakan tujuan komunikasi krisis adalah agar masyarakat tidak salah dalam menerima informasi terkait covid-19 serta ikut untuk mencegah penularan covid-19

*“Pemberitaan Covid-19 yang tersebar di Media Sosial Facebook hampir semua masyarakat melihat dan membaca seputar perkembangan Covid-19, namun ada juga dari beberapa masyarakat yang tidak percaya dengan berita-berita yang tersebar di media sosial facebook.”*

Selain itu, standar komunikasi yang harus digunakan sama seperti informan 2 bahwa standar komunikasi harus mudah diterima dengan bahasa yang umum dan mudah dipahami masyarakat.

*“Standar komunikasi yang pasti harus mudah diterima oleh masyarakat dengan publikasi yang menarik agar masyarakat mudah untuk menerapkan. Intinya masyarakat jangan panik, ini kejadian yang memang harus dihadapi, tapi jangan ditakuti. Pada saat kita takut, maka kita tidak akan mampu mengatasi permasalahan ini. Kata kuncinya hanya satu, jika warga sehat coronanya akan minggat”*

### **Deskripsi Tekstural Informan 4**

#### **1. Pandangan pribadi terkait komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan Covid-19**

Informan 4 seorang perempuan bernama dyas berusia 25 tahun. Dyas menjadi salah satu pegawai Pemerintahan Kota Semarang di Dinas Komunikasi dan Informasi. Dyas mengakui untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan penanganan covid-19 pada masyarakat memang sulit. percepatan vaksinasi covid-19 dilokasi masing-masing warga, dari lorong kelorong, perkelurahan, per RT, ditempat ibadah agar bisa maksimal, selain itu kita juga melakukan pendekatan melalui sosialisasi lewat tokoh masyarakat dan perangkat lingkup warga. Dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, dinas Kesehatan bisa memberikan pemahaman dan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat dan alhasil masyarakat juga menerima baik informasi yang kami berikan dan mau menggunakan vaksin covid-19.

## 2. Media, tujuan, dan pedoman yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Covid-19.

### a. Connectedness and separatedness

Dalam menjalin hubungan informan 4 mengatakan bahwa terdapat rasa saling bergantung satu sama lain namun juga setiap individu memiliki space masing masing, informan 4 memastikan ketika pasangannya membutuhkan sesuatu informan 4 akan bersedia untuk mendengarkan, selain itu informan 4 juga tidak membatasi me time yang dimiliki oleh pasangannya, sebelumnya informan 4 mengaku sangat cemburu ketika pasangannya melakukan kegiatan bersama teman temannya, namun rasa cemburu itu berkurang seiring berjalannya waktu.

*“Media, seperti yang saya ungkapkan tadi biasanya kami lebih menggunakan media cetak*

*seperti baleho, sapnduk, banner dan juga media sosial seperti facebook dan instagram.”*

### b. Certainty and uncertainty

Informan 4 mengungkapkan bahwa tujuan komunikasi dilakukan agar terjalin lintas sektor yang baik demi tercapainya tujuan bersama. Pemerintah sudah membuat kebijakan berupa protokol kesehatan yang dipatuhi masyarakat.

*“Ya, tentunya dalam mengedukasi masyarakat kami melakukan pendekatan baik secara langsung kepada masyarakat atau dengan bantuan lintas sektor. Kami bekerja sama dengan puskesmas dalam hal ini menjadi partner kita dilapangan khususnya dikelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin dan juga kepada pihak lintas sektor yang lain seperti dinas- dinas ataupun kelurahan .”*

*“Dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, dinas Kesehatan bisa memberikan pemahaman dan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat dan alhasil masyarakat juga menerima baik informasi yang kami berikan dan mau menggunakan vaksin covid-19”*

*“Pemerintah selama ini dalam rangka pencegahan virus Corona telah membuat kebijakan, menambah ruang layanan masyarakat, menyediakan fasilitas saranapenampungan korban virus Corona, menyediakan dana untuk bantuan sosial kepadamasyarakat yang terdampak virus Corona, memberikan bantuan alat-alat kesehatan berupa alat pelindung diri (APD), baju astronot masker*

untuk tenaga medis berstandar kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh paramedis sebagai garda terdepan dalam membantu korban virus Covid-19. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyediakan cairan disinfektan, menaati peraturan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja, bekerja di rumah dan untuk tidak pulang kampung, menutup tempat objek wisata, tidak melakukan kunjungan dan mengadakan kegiatan yang menghimpun banyak orang seperti, arisan, pelaksanaan perayaan agama, kegiatan ibadah agama, pesta perkawinan.

#### **Deskripsi Tekstural Informan 5**

##### **1. Pandangan pribadi terkait komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan Covid-19**

Informan 5 bernama Berri dan berusia 25 tahun, salah satu pegawai Pemerintahan Kota Semarang. Berri mengatakan media informasi dan alur informasi untuk komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sudah baik dilakukan dan sudah maksimal. kerjasama antar lintas sektor seperti seperti kantor-kantor, kelurahan yang dimana kelurahan ini yang mempunyai kuasa atas masyarakatnya untuk memberikan informasi, selain itu media juga menjadi alat batu bagi kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat

##### **2. Media, tujuan, dan pedoman yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Covid-19.**

###### **a. Connectedness and separatedness**

Menurut informan 5 media yang digunakan dalam informasi terkait penanganan covid-19 di pemerintahan Kota Semarang dua media online kaya facebook sama

instagram, terus kita juga pake baleho, spanduk, banner. Itu banyak yang ditempel ditempat-tempat vaksinasi.

“Media yang kami gunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat itu, yaa seperti media online kita itu menggunakan dua media online kaya facebook sama instagram, terus kita juga pake baleho, spanduk, banner. Itu banyak yang ditempel ditempat-tempat vaksinasi. Di dinas sini saja ada itu banner vaksin covid-19 yang tulisannya ayo vaksin. intinya kita mengajak masyarakat.”

“Media yang kami gunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat itu, yaa seperti media online kita itu menggunakan dua media online kaya facebook sama instagram, terus kita juga pake baleho, spanduk, banner. Itu banyak yang ditempel ditempat-tempat vaksinasi. Di dinas sini saja ada itu banner vaksin covid-19 yang tulisannya ayo vaksin. intinya kita mengajak masyarakat.”

###### **b. Certainty and uncertainty**

Menurut informan 5 tujuan utama komunikasi dan informasi publik adalah terhindar dari virus covid-19. Serta terwujudnya perubahan perilaku hidup dan sehat agar masyarakat lebih sadar dan peduli dengan kesehatan.

“Yang pasti tujuan utamanya agar Kota Semarang segera terhindar dari Virus Covid-19”

“Perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dapat terjadi dengan perencanaan strategi komunikasi yang efektif dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung. Peningkatan upaya promosi melalui strategi komunikasi yang efektif dapat diukur dari peningkatan health

*literacy masyarakat yang tercermin dari persentase masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Konten dan penyampaian materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE) perlu mempertimbangkan kebutuhan orang dengan disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, dan masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Untuk menunjang perilaku hidup sehat, upaya promosi perlu didukung upaya identifikasi kelompok yang beresiko segera teratasi.”*

## **PEMBAHASAN**

COVID-19 mengancam kehidupan manusia dan stabilitas ekonomi suatu negara. Penularan global COVID-19 yang cepat telah menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan COVID-19 sebagai pandemi global per 11 Maret 2020 (Widyaningrum 2020). Pada saat yang sama, virus ini telah dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern (USPPI), khususnya darurat kesehatan masyarakat global. Sebelumnya WHO telah mendeklarasikan beberapa virus seperti Ebola pada tahun 2014 dan 2016, Zika pada tahun 2016, Polio pada tahun 2014 dan flu babi (virus H1N1) pada tahun 2009 sebagai PHEIC (BBC 2020). Hingga awal Maret 2020, media masih dibanjiri pernyataan pemerintah bahwa Indonesia bebas COVID-19 (Purba 2020; Purnomo 2020; Putri dan Ramadhan 2020; Syakirah 2020; Budiansyah 2020). Beberapa pejabat negara bahkan mentweet COVID-19 sebagai lelucon (Renaldi 2020). Kurangnya kecerdikan dalam menangani COVID-19 mendapat tanggapan internasional, termasuk para ahli yang mempertanyakan proses dan peralatan pendeteksian virus (Arshad 2020; Syakirah 2020; Massola 2020; Paddock dan Sitanding 2020). Informasi pemerintah tentang penanganan COVID-

19 juga dinilai tidak transparan (Anugerah 2020; Budiansyah 2020; Bland 2020).

Seperti yang telah kita pahami, komunikasi kesehatan merupakan salah satu kunci dan faktor penting untuk menjaga, memastikan dan menyelamatkan nyawa jika terjadi krisis kesehatan, termasuk krisis yang disebabkan oleh penyebaran virus Corona. Dalam hal ini, komunikasi kesehatan yang terencana dan terukur dapat memfasilitasi pengelolaan situasi yang tidak pasti dan mengurangi ketakutan masyarakat. Promosi kesehatan harus dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku dan memberikan harapan masyarakat dalam menghadapi krisis (Ngai et al. 2020). Tentu saja, komunikasi pemerintah yang efektif tentang epidemi memiliki peran penting. Komunikasi medis tentang COVID-19 diperlukan untuk memberikan informasi tentang penyebaran penyakit saat ini, motivasi mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi penularan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah bahwa pemerintah dapat mengendalikan situasi yang sedang berlangsung (U.S. Department of Health and Human Services 2018; Patrianti, Shabana, dan Tuti 2020).

Secara umum dipahami, krisis manajemen terbagi menjadi tiga tahapan utama yaitu pre-crisis, krisis, dan postcrisis (Coombs 2012). Jika ketiga tahapan ini diaplikasikan dalam konteks komunikasi krisis kesehatan, maka dapat diasumsikan bahwa akan terdapat perbedaan instruksi distribusi pesan kepada masyarakat di setiap tahapan krisis kesehatan yang sedang terjadi (Nyenswah, Engineer, and Peters 2016). Terjadinya perbedaan distribusi pesan ini dikarenakan perlunya penanganan secara tepat di setiap tahapan krisis kesehatan yang berlangsung. Tahapan krisis kesehatan mencakup (1) tahap inisiasi atau periode awal mula pengenalan krisis, (2) tahap darurat atau periode peningkatan kasus terjadi dengan sangat cepat dan

upaya difokuskan untuk mengelola sistem kesehatan, (3) tahap penurunan (declining) epidemi yaitu periode saat jumlah kasus penyebaran mulai menurun, dan (4) tahap keberlanjutan epidemi atau long tail of the epidemic (World Health Organization 2009). Berkaitan dengan pandemi COVID19 yang terjadi saat ini, WHO mengategorikan penyebaran COVID-19 ke dalam empat skenario, yaitu (1) no cases atau tidak ada kasus terdeteksi di lingkup suatu negara/wilayah/area; (2) sporadic cases atau kasus mulai terdeteksi di negara/wilayah/area karena transmisi lokal atau transmisi dari luar (imported cases); (3) clusters of cases yaitu saat kasus yang dialami negara/wilayah/area mulai dikelompokkan berdasarkan waktu, letak geografis, atau berdasarkan keterpaparan umum; dan (4) community transmission yakni saat terjadi penyebaran lokal wabah skala besar di suatu negara/wilayah/area (World Health Organization 2020). Komunikasi krisis dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dengan kerjasama dan menjalin hubungan antar sektor yang baik dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Dengan merencanakan dan membangun kelompok kerja yang kompeten untuk monitoring dan tracking terkait Covid-19 dalam penanganan Covid-19. Pemkot Semarang menggunakan berbagai media untuk memberikan update harian dan hotline. Media yang digunakan berupa media cetak seperti baleho, umbul-umbul, umbul-umbul dan juga media sosial seperti facebook dan instagram serta radio dan televisi.

Berdasarkan pengalaman selama pandemi influenza, setelah melewati keempat fase tersebut, cenderung berlanjut ke post-peak (periode di mana serangan cenderung berulang) dan post-pandemi (periode di mana wabah cenderung kembali). penyebaran virus/penyakit menurun secara siklis (Lee 2014 ). Dalam komunikasi krisis

kesehatan, sumber pemerintah dan pejabat dianggap sebagai sumber informasi penting karena otoritas dan keandalannya. Liputan media selama wabah seringkali mengadopsi siaran pers yang cenderung preventif, tematik, emosional, pencapaian, dan sentimen positif (Ogbodo et al. 2020). Tren konten ini membantu peneliti menentukan bagaimana media melaporkan dan efektivitas peliputannya (Ngai et al. 2020; Liu dan Kim 2011; Shih, Wijaya dan Brossard 2008). Media dan pemerintah cenderung melakukan enam kategori dalam menyebarkan pesan kesehatan. Keenam kategori tersebut adalah konflik (aspek yang menimbulkan ketegangan antar pihak), tindakan (tindakan dalam menanggapi suatu krisis, saat ini dan yang sedang berlangsung), konsekuensi (dampak atau tingkat keparahan krisis), temuan baru (temuan yang berkontribusi pada pemahaman krisis). ), ketidakpastian (ambiguitas dan kurangnya pemahaman tentang penyebaran penyakit dan cara mengatasinya) dan jaminan (membangun kepercayaan publik) (Ngai et al. 2020; Liu et al. Kim 2011; Higgins et al 2006; Umphrey 2003 ). Sementara itu, dalam menghadapi masalah kesehatan, sering disampaikan lima jenis pesan.

Kelima kategori tersebut adalah deteksi sumber, pencegahan penyakit, layanan dan sistem perawatan kesehatan, temuan ilmiah terbaru yang menunjukkan penyebaran penyakit dan gaya hidup yang memfasilitasi penularan (Thorpe dan 2008). Dalam kesehatan masyarakat, tiga bidang bersinggungan untuk membentuk dasar pendidikan masyarakat. Ketiga bidang tersebut adalah peningkatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Thorpe et al. 2008). Termasuk dalam peningkatan kesehatan di antaranya adalah isu-isu yang terkait pencegahan penyakit dan digunakan untuk menangani permasalahan mendasar kesehatan masyarakat. Sementara itu, perlindungan kesehatan bertujuan untuk

mengendalikan penyebaran penyakit menular, termasuk melalui pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan mencakup tentang peningkatan sistem pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, praktik yang di dasari dengan bukti (evidence-based practice), efektifitas klinis, dan ekonomi kesehatan. Selanjutnya, kombinasi antara sebelas isu dalam media terkait manajemen krisis kesehatan dan isu kesehatan menghasilkan empat basis kategori guna menginvestigasi konten isi berita online. Keempat kategori ini adalah (1) informasi dasar, yaitu informasi mengenai status terkini terkait penambahan kasus, meninggal dan sembuh COVID-19; (2) pencegahan penyakit, yakni informasi mengenai kampanye kesehatan yang dilakukan pemerintah seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, serta informasi pencegahan lainnya guna mengurangi penyebaran COVID-19; (3) perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan, yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa COVID-19, seperti PSBB, belanja peralatan kesehatan, insentif tenaga medis, dan peningkatan fasilitas kesehatan; dan (4) konsekuensi, yakni dampak sosial, budaya, dan ekonomi COVID-19, misalnya larangan sementara aktivitas di tempat ibadah, larangan berkumpul, hilangnya pekerjaan, penurunan ekonomi, dan runtuhnya sektor pariwisata. Tahap krisis dapat ditentukan karena pada bulan Februari pemerintah Indonesia menyadari tanda-tanda bahwa COVID-19 dapat menjadi ancaman global dan oleh karena itu pemerintah juga harus siap menghadapi ancaman tersebut. Bahkan, pengabaian pemerintah bahkan terlihat sejak Januari 2020, dengan laporan yang mengamati beberapa akun media sosial resmi di Indonesia. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa COVID-19 hanya menjadi bahan tertawaan pejabat negara di akun Twitter (Mendy, Stewart dan VanAkin 2020). Situasi ini menimbulkan

kecurigaan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menyadari bahwa COVID-19 akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat hingga kasus virus COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret. Dari frekuensi kemunculan sumber berita pemerintah di tiga platform berita online periode Maret hingga Juni 2020, terlihat frekuensi dan liputannya sebanyak 685 kali dengan total 19.118 berita. Data tersebut menunjukkan bahwa situasi krisis COVID-19 telah terjadi dan pemerintah merasa perlu untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 yang dilakukan melalui media.

Diantaranya adalah kebijakan komunikasi publik, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pembatasan lalu lintas. Tingginya duplikasi laporan kepala negara tentang COVID-19 mungkin karena kepala negara bahkan lebih dapat diandalkan sebagai sumber utama daripada sumber kelompok kerja COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, pada awal Juni hingga Juli, dimulai masa transisi yang ditandai dengan berkurangnya liputan media tentang COVID-19 dan dimulainya new normal, meskipun beberapa media melaporkan sudah dimulai sejak Mei 2020. tentang COVID-19 oleh Kepala Negara, Kementerian Kesehatan dan tim Gugus Tugas COVID-19 berjumlah 2.299 dengan frekuensi 146 kejadian menurut sumber. Transisi dari fase krisis ke periode pasca krisis juga ditandai dengan pembubaran gugus tugas COVID-19 dan pembentukan kelompok terpadu untuk mengendalikan dan mengelola COVID-19 dan memulihkan ekonomi internasional negara, lebih fokus pada negara. pemulihan ekonomi. Jika melihat tahapan krisis kesehatan, Indonesia belum memasuki masa penurunan. Padahal, menurut data media terbaru yang didapat, penambahan kasus positif masih terjadi dalam jumlah besar dan terus meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pemberitaan pada periode pascakrisis ini, sumber daya kepala negara dan gugus

tugas COVID-19 tidak terpaut jauh yakni 47% dan 45%. Secara keseluruhan, peran narasumber Kemenkes di ketiga media online tersebut tidak banyak diperbincangkan.

## SIMPULAN

Peralihan media massa pemerintah dari komunikasi krisis ke komunikasi risiko dilakukan tidak hanya sebagai persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengevaluasi komunikasi yang dikelola pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan strategi komunikasi pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 [wanita. Keberhasilan komunikasi risiko tidak dapat dilihat hanya dari strategi komunikasi massa pemerintah melalui berbagai media. Namun, penting juga bagaimana reaksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang membutuhkan informasi dari sumber terpercaya dan bertanggung jawab dengan konten yang berkualitas dan menarik tentang berbagai upaya penanganan pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aria, P. (2020). *Ekonomi Indonesia dalam Skenario Terburuk Akibat Virus Corona*, dalam katadata. co.id: <https://katadata.co.id/telaah/2020/03/26/ekonomi-indonesia-dalam-skenario-terburukakibat-virus-corona>
- Darmawan, A. D. (2021). *Jumlah Positif Meninggal Dunia di Jawa tengah*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2021/07/05/data-nasional-kota-semarang-masuk-lima-wilayah-dengan-jumlah-positif-meninggal-dunia-di-atas-1407-orang>.
- Devito, J. A. (1998). *Communicology: An introduction to the study of communication*. New York: Harper & Row.
- Devlin, E. S. (2006). *Crisis Management Planning and Execution*. New York: Auerbach Publications.
- Handayanto, R. T., & Herlawati, H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119-124.
- Hidayat, D. N. (2003). *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Hidayat, D., Gustini, L. K., & Dias, M. P. (2020). Digital Media Relations Pendekatan Public Relations dalam Menyosialisasikan Social Distancing di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 257-268.
- Hidayat, E. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3), 126-136.
- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations Issue and Crisis Management*. Jakarta: Prenanda Media Group
- Macnamara, J. (2021). New Insights into Crisis Communication from an 'Inside' Emic Perspective During COVID-19, *Public Relations Inquiry*, Vol. 10, No. 2, pp 237-262.
- Octastefani, T. (2020) Bridging the State and Society: Rethinking of Social

- Response and Disaster Risk Reduction during Uncertainties Future of Covid-19 in Indonesia. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 27(3).
- Praditya, I. I. (2020). *Dampak Corona, Pertumbuhan Ekonomi 170 Negara Diprediksi Negatif*, dalam liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4225298/dampak-corona-pertumbuhanekonomi-170-negara-diprediksi-negatif>.
- Purbaya, A. A. (2020). *Semarang Rawan Jadi Episentrum Corona, Ganjar-Hendi Singgung Kedisiplinan*, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4997552/semarang-rawan-jadi-episentrum-corona-ganjar-hendi-singgung-kedisiplinan?single=1>.
- Regester, M., & Larkin, J. (2003). *Risk Issues and Crisis Management in Public Relations*. New Delhi: Crest Publishing House.
- Rosidin, U., Rahayuwati, L., & Herawati, E. (2020). *Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. Umbara*, 5(1), 42-50.
- Siaga Corona. (2022). *Data Tahun 2020-2022 Informasi Coronavirus (COVID-19) Semarang*, dalam <https://siagacorona.semarangkota.go.id/halaman/covid19pertahun/2022>.
- Smeru. (2020). *Mendorong Revisi UU Penanggulangan Bencana untuk Membangun Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Adaptif: Pembelajaran dari Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia*, dalam <https://smeru.or.id/id/publication-id/mendorong-revisi-uu-penanggulangan-bencana-untuk-membangun-tata-kelola-penanggulangan>.
- Smeru. (2020). *Pengentasan COVID-19 dengan Metode PCR*, dalam <https://smeru.or.id/id/publication-id/mendorong-revisi-uu-penanggulangan-bencana-untuk-membangun-tata-kelola-penanggulangan>.
- Tirkkonen, P. & Luoma-aho, V. (2011). Online Authority Communication During an Epidemic: A Finnish Example, *Public Relations Review*, Vol. 37, pp. 173-174.
- WHO. (2020). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Situation Report-51, dalam [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10).
- Yusuf, M. D. (2022). *Angka Kasus Covid-19 di Kota Semarang Naik, Ratusan Warga Kembali Terpapar*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/11/21/191204278/angka-kasus-covid-19-di-kota-semarang-naik-ratusan-warga-kembali-terpapar>